



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNA KAWURI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 212799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.254.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/70 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/70 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/170 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 105.000.000**

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 28.650.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.231.845.871**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	2.619.495.871
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.619.495.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.